

PERAN DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKANBARU DALAM MEWUJUDKAN AKSES PENDIDIKAN YANG MERATA DAN BERMUTU TAHUN 2018

Oleh : Reza Pradana Nugraha

Dosen Pembimbing :

Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Education is something that is very essential in the humanitarian process in a cultured society. So in practice, every child has the right to get an education which has become his right to obtain an education that is accessible and of good quality. There are various kinds of problems to make it happen, such as education infrastructure such as school spaces that are still lacking, and the low quality of education is caused by the number of teachers who are not evenly distributed and the level of teacher welfare cannot be said to be good, especially teachers who are not civil servants. There are two problem formulations in this research, namely "How is the role of the Pekanbaru city education office in realizing equal and quality access to education and the inhibiting factors in its implementation".

The research approach used is a qualitative approach. while the type of research used is descriptive. The data was collected by the author using interview and documentation techniques. The data used are primary data obtained from research informants and further supported by secondary data obtained from various government agencies related to this research.

The results showed that the Education Office made various efforts in order to achieve equal and quality access to education in Pekanbaru City. This is supported by increasing the role of the government, in this case the education office. Efforts are being made to use the theory of the role of government, namely (1) Role as community service, (2) Role as facilitator, (3) Role as companion, (4) Role as partner, (5) Role as funder. In carrying out its duties and functions in realizing equitable and quality access to education, the Pekanbaru City Education Office experiences several obstacles such as limited budget and human resources.

Keywords: Role, Even and Quality Education, Education Office

Pendahuluan

Pendidikan merupakan sebuah keharusan bagi bangsa Indonesia demi perkembangan pembangunan, sebab dasar pembangunan yang strategis adalah pendidikan. Pendidikan haruslah digunakan untuk mendidik segenap rakyat, bukan hanya untuk beberapa golongan tertentu saja. Oleh karena itu, tugas negaralah yang harus mengatur hal tersebut untuk proses pencerdasan bangsa.

Pesan selanjutnya yang terkandung dalam UUD 1945 ialah pendidikan nasional ditujukan untuk seluruh rakyat dan bukan hanya untuk sebagian kecil masyarakat. Dengan sendirinya sistem pendidikan nasional yang hanya mengalokasikan kepada segelintir rakyat Indonesia bukan hanya bertentangan dengan UUD 1945, tetapi juga pengingkaran terhadap hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Dalam Bab IV Pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa: "*Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum*". Urusan pemerintahan absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan *urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, yang sekaligus juga menjadi dasar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah*.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah menetapkan kebijakan kriteria minimal sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk Standar Nasional Pendidikan. Kebijakan NSP tersebut bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa

yang bermartabat. Sehingga warga negara dapat merasakan pendidikan yang merata sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 bisa dapat berjalan dengan lancar.

Pemerintah Kota Pekanbaru yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan meningkatkan mutu pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru yang merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedudukan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru merupakan unsur pelaksana pemerintah Kota Pekanbaru di bidang pendidikan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan sesuai kewenangan pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sampai saat ini Kota Pekanbaru belum memiliki Peraturan Daerah yang khusus untuk pendidikan. Oleh karena nya digunakan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 92 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan kota pekanbaru. Pasal 4 Ayat E menjelaskan bahwa pembinaan dan pelaksanaan urusan bidang pendidikan. Berdasarkan hal tersebut maka dinas pendidikan kota pekanbaru mempunyai tugas dalam urusan pendidikan.

Salah satu dari misi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru adalah mewujudkan akses pendidikan yang merata dan bermutu di semua jenjang dan jenis pendidikan. Akses pendidikan adalah jalur masuk, sehingga akses pendidikan adalah jalur masuk menuju pendidikan. Akses terhadap pendidikan yang merata berarti semua penduduk usia sekolah telah memperoleh kesempatan pendidikan, sementara itu akses terhadap pendidikan telah adil jika antar kelompok bisa

menikmati pendidikan secara sama.

Akses pendidikan merata merupakan langkah-langkah dalam melakukan pemerataan pendidikan yang sama sehingga tidak ada kesenjangan antara sekolah-sekolah yang ada di daerah naungannya. Akses pendidikan bermutu merupakan usaha dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh yang berguna untuk mencerdaskan anak-anak secara keseluruhan. Namun sampai sejauh ini misi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru untuk mewujudkan akses pendidikan yang merata dan bermutu belumlah tercapai adanya.

Banyak hal yang menjadi penyebab misi tersebut belum terwujud dan penulis akan memaparkan masalah apa saja yang terjadi sehingga misi tersebut belum dapat terwujud oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui fenomena-fenomena yang terjadi sebagai berikut :

1. Masih banyaknya infrastruktur pendidikan yang sudah rusak dan masih tidak layak seperti kursi, meja dan lantai pelapon yang perlu diperbaiki. Hal ini seperti yang di utarakan oleh kepala dinas kota pekanbaru. Sekarang ini kondisi sekolah yang ada di bawah kewenangan pemerintah kota pekanbaru 25% diantaranya dalam kondisi tidak layak. Sedangkan yang lainnya ada juga yang perlu di renovasi. Berikut data yang peneliti peroleh dari lapangan:

Tabel 1.1
Jumlah Sekolah dan Kondisi
Ruang Kelas

Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah	RuangKelas			
		Jumlah	Baik	Rusak Ringan	RusakSdg/ Brt
TK	272	-	-	-	-
SD	299	3.084	1.976	1.067	41
MI	23	221	172	48	1
SMP	129	1.324	765	544	5
MTs	30	317	-	-	-
JUMLAH	831	4.408	2741	1.611	46

sumber: Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru 2017–2022

Berdasarkan Tabel tersebut, masih banyaknya ruang kelas yang masih dalam kondisi rusak. Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru diketahui bahwa ruang kelas yang terdapat pada sekola TK,SD, SMP dalam kondisi yang rusak ringan dan rusak berat. Dimana dari 831 sekolah di Kota Pekanbaru terdapat 4.408 ruang kelas masih masih terdapat 1.611 ruang kelas yang dalam kondisi rusak ringan dan 46 ruang kelas dalam kondisi rusak berat atau tidak layak di pakai.

2. Masih rendahnya mutu pendidikan di Kota Pekanbaru, dimana pada tahun 2018 mengalami penurunan prestasi dari segi nilai sebagai salah satu indikator pencapaian kinerja pada bidang pendidikan. Pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tahun 2018 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Pencapaian Target Kinerja Mutu
Bidang Pendidikan Kota
Pekanbaru Tahun 2018

No	Indikator	Tahun	
		2017	2018
1	Rata-Rata Nilai USBN SD/MI	75.50	71.64
2	Rata-Rata Nilai UN SMP/MTs	69.00	50.05
3	Angka Partisipasi Kasar SD/MI	107.31	101.32
4	Angka Partisipasi Murni Usia 7-12 Tahun (SD/MI)	95.00	92.16
5	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs	96.04	90.72
6	Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun (SMP/MTs)	80.00	75.30
7	Nilai IKM Dinas Pendidikan	81.26	72.50
8	Nilai AKIP Dinas Pendidikan	B	C

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, 2017-2018

Berdasarkan tabel tersebut, Nilai USBN SD/MI Tahun 2017 75.50% sedangkan di tahun 2018 mengalami penurunan yakni 71.64%, Nilai UN SMP/MTs Tahun 2017 69.00% dan turun menjadi 50.05%, Angka Partisipasi Kasar SD/MI di Tahun 2017 107.31% dan turun menjadi 101.32%, Angka Partisipasi Murni 7-12 Tahun SD/MI di Tahun 2017 95.00% dan turun menjadi 92.16%, Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs di tahun 2017 96.04 dan turun menjadi 90.72%, Angka Partisipasi Murni Usia 13-15 Tahun SMP/MTs di tahun 2017 80.00% dan turun menjadi 75.30% ,Nilai IKM Dinas Pendidikan di tahun 2017 81.26% dan turun menjadi 72.50%, sedangkan untuk nilai AKIP Dinas Pendidikan mengalami penurunan yang semula B menjadi C pada tahun 2018.

Sedangkan, untuk akreditasi sekolah pada tingkat SD-SMP di Kota Pekanbaru pada tahun 2018 masih terdapat yang belum terakreditasi, sebagaimana data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sebagai berikut :

Tabel 1.3
Data Akreditasi Sekolah SD
SMP Kota Pekanbaru Tahun
2018

Nama Sekolah	Status Sekolah		Total	Akreditasi				Total
	Negeri	Swasta		A	B	C	Belum	
SD Negeri	194	0	194	98	78	11	3	190
SD Swasta	0	113	113	63	7	4	18	92
SMP Negeri	44	0	44	30	7	0	7	44
SMP Swasta	0	94	94	33	27	7	27	94
Jumlah	238	207	445	224	119	22	55	420

Berdasarkan tabel tersebut jumlah keseluruhan sekolah pada tingkat SD-SMP, status sekolah yang berstatus negeri terakreditasi A yakni sebanyak 224 sekolah, akreditasi B sebanyak 119 sekolah, akreditasi C sebanyak 22 sekolah dan yang belum terakreditasi sebanyak 55 sekolah.

- Masih banyaknya tenaga pengajar yang berstatus Non ASN atau masih berstatus Honorer. Jumlah tenaga pendidik yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sebanyak 8.878 orang. Dilihat dari status kepegawaiannya

sebanyak 58,8% dari jumlah tersebut merupakan tenaga pendidik (guru) non ASN. Adapun rincianya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Guru Menurut Jenjang dan Status Kepegawaian

No	Jenjang	Status ASN dan Non ASN		Total
		ASN	NON ASN	
1	TK	66	1.010	1.076
2	SD	2.320	3.473	5.793
3	SMP	1.250	1.399	2.649
	Total	3.636	5.882	9.518

sumber: Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru 2017–2022

Berdasarkan tabel tersebut, pada tingkat TK jumlah guru yang berstatus ASN sebanyak 66 sedangkan yang Non ASN sebanyak 1.010, sedangkan tingkat SD guru yang berstatus ASN sebanyak 2.320 sedangkan Non ASN sebanyak 3.473, dan tingkat SMP yang berstatus ASN sebanyak 1.250 dan Non ASN 1.399. Sedangkan Total secara keseluruhan dari jumlah guru di Kota Pekanbaru sebanyak 9.518 dan yang hanya berstatus sebagai ASN sebanyak 3.636 orang guru saja, sedangkan selebihnya Non ASN yakni sebanyak 5.882 orang guru. Sedangkan itu, terdapat sekitar 25% Guru yang masih berstatus Non sertifikasi di Kota Pekanbaru, sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 1.5
Daftar Rekapitulasi Guru Sertifikasi Dan Non Sertifikasi Kota Pekanbaru Tahun 2018

TINGKAT	SERTIFIKASI	NON SERTIFIKASI	JUMLAH
TK	104	12	116
SD	1696	419	2115
SMP	1130	105	1235
FUNGSIONAL	68	19	87
JUMLAH	2998	555	3553

sumber: Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru 2017–2022

Berdasarkan tabel tersebut, pada tingkat TK jumlah guru yang ter sertifikasi sebanyak 104 dan non sertifikasi sebanyak 12 guru, tingkat SD jumlah guru yang ter sertifikasi sebanyak 1696 dan non sertifikasi sebanyak 419 guru, tingkat SMP jumlah guru yang ter sertifikasi sebanyak 1130 dan non sertifikasi sebanyak 105 guru, tingkat fungsional yang tersertifikasi sebanyak 68 dan non sertifikasi sebanyak 19 guru. Dengan ini jumlah keseluruhan guru yang tersertifikasi di segalan jenjang berjumlah 2998 guru dan non sertifikasi sebanyak 550 guru.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Mewujudkan Akses Pendidikan Merata dan Bermutu Tahun 2018”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan penulis diatas, maka rumusan masalah yang akan di teliti oleh penulis adalah :

1. Bagaimana Peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam mewujudkan akses pendidikan merata dan bermutu Tahun 2018?.
2. Apa saja faktor penghambat Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam mengupayakan akses pendidikan merata dan bermutu Tahun 2018?.

Kerangka Teori

1. Peran

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi

Menurut Soejono Soekanto, peran adalah Aspek dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran konsepsi peran mengandalkan seperangkat harapan kita diharapkan untuk bertindak dengan cara-cara tertentu dan mengharapkan orang lain untuk bertindak dengan cara-cara tertentu pula.

Suatu peran paling sedikit mencakup 3 hal, yaitu:

- a. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan kedudukan atau tempat seseorang dalam masyarakat;
- b. Peran adalah suatu konsep ikhwal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat;
- c. Peran dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari paparan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang- orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial

yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang“ dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.

a. Aspek- aspek Peran

Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam empat golongan, yaitu:¹

1. Orang- orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
3. Kedudukan orang- orang dalam perilaku
4. Kaitan antara orang dan perilaku

2. Peran Pemerintah

ada beberapa bentuk peran pemerintah didalam peningkatan pendidikan yaitu Peran sebagai Pelayan Masyarakat, sebagai Fasilitator, sebagai pendamping, sebagai mitra dan berperan sebagai penyandang dana. Untuk lebih jelasnya peran - peran pemerintah didalam pendidikan yaitu²:

1) Peran Sebagai Pelayan Masyarakat

Pemerintah berperan sebagai pelayan masyarakat didalam pendidikan yaitu pemerintah melayani kebutuhan masyarakat mengenai tentang pendidikan. Pemerintah mengutamakan masyarakat untuk dilayani agar pengembangan pendidikan setiap masyarakat bisa menjadi lebih baik lagi.

2) Peran Sebagai Fasilitator

Pemerintah berperan sebagai fasilitator yaitu pemerintah sebagai penyedia tempat atau penyedia fasilitas untuk pendidikan. Mempunyai peran seperti ini pemerintah seharusnya bisa berbaur dalam masyarakat mendengarkan aspirasi masyarakat mengenai fasilitas sekolah yang ada di

daerah tersebut dan benar – benar mengecek kebenaran pengaduan masyarakat akan kurangnya atau perlunya perbaikan fasilitas.

3) Peran Sebagai Pendamping

Pemerintah selain mempunyai tugas utama menjadi pelayan masyarakat, tapi pemerintah mempunyai tugas sebagai pendamping di dalam pendidikan. Bisa mendampingi masyarakat, menerima keluhan masyarakat mengenai pendidikan sehingga masyarakat bisa merasa teras ada pihak pemerintah yang akan selalu ada untuk mendampingi buat mereka untuk memperoleh jawaban atas keluhan yang mereka rasakan mengenai pendidikan yang ada di daerahnya masing – masing. Dan masyarakat akhirnya merasakan peran pemerintah begitu nyata karena selalu ada di sekitar masyarakat itu sendiri.

4) Peran Sebagai Mitra

Pemerintah berperan sebagai mitra disini yaitu pemerintah menjadi rekan kerjasama antara pihak sekolah dan masyarakat. Pemerintah dalam menentukan kebijakan dalam pendidikan harus bisa mengerti dan memahami keadaan pendidikan setiap daerah. Sehingga nantinya tidak ada unsur pemaksaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Untuk itu, setiap keputusan bisa dibicarakan dengan pihak sekolah dan masyarakat mengenai kebijakan yang akan dibuat mengenai pendidikan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menentukan tentang kebijakan baru.

5) Peran Sebagai penyandang Dana

Pemerintah sebagai penyandang dana yaitu pemerintah memmmberikan bantuan dana kepada instansi sekolah yang memerlukan dan memberikan dana kepada siswa yang membutuhkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perkilatan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dalam hal ini termasuk Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknis analisis data yang digunakan adalah analisis data interaktif yang disampaikan oleh Hubberman dan Miles dimana terdapat tiga hal utama dalam analisis interaktif, yakni, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verivikasi sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut “analisis”.

Hasil Penelitian

Peran Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Mewujudkan Akses Pendidikan Merata dan Bermutu Tahun 2018

peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana Pendidikan masih perlu mendapat perhatian yang cukup serius, mengingat daya tampung siswa saat ini masih belum memenuhi akan kenyamanan dan ketenagan dalam proses belajar mengajar. Sementara itu Otonomi Daerah telah merangsang perubahan Aspirasi dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan cakupan layanan pendidikan. Dilain pihak

kemampuan tenaga kependidikan untuk mengembang tugasnya secara profesional melalui pelatihan – pelatihan masih perlu ditingkatkan. Pembangunan pendidikan didalamnya mencakup tujuan pendidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, guru, metoda pembelajaran, dan murid.

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru selaku penanggungjawab sistem pendidikan di Kota Pekanbaru memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan bermutu bagi semua masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Berangkat daripada itu semua maka Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Tahun 2017-2022.

Adapun maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru 2017 - 2022 adalah untuk memberikan arah dan acuan kerja dalam rangka menata dan membenahi organisasi, sehingga bisa berjalan sesuai rencana kerja Dinas Pendidikan dan pada akhirnya bisa memacu percepatan pencapaian visi dan misi Kota Pekanbaru. Renstra Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 diharapkan dapat juga mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian Pendidikan Nasional, Bappenas dan Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Pada saat ini perkembangan pemukiman penduduk dan anak usia sekolah lebih terkonsentrasi pada kecamatan Tenayan, Tampan, Bukit Raya, Marpoyan Damai dan kecamatan Payung Sekaki. Untuk mengantisipasi lonjakan anak usia sekolah tersebut, maka kebijakan pemerintah Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan, dalam hal penambahan Unit Sekolah Baru (USB) lebih diutamakan ke kecamatan Tampan, Tenayan, Bukit Raya, Marpoyan Damai dan kecamatan Payung Sekaki. Kawasan pendidikan ini akan didukung oleh akses ke sistem jaringan transportasi massal agar para peserta didik dan tenaga pendidik mudah untuk

menjangkau lokasi sekolah dari tempat tinggal mereka masing-masing.

Apabila diperhatikan tentang persoalan belum meratanya akses pendidikan di Kota Pekanbaru maka penyebab utamanya adalah sebaran penduduk usia sekolah yang banyak berada di pinggiran kota, sedangkan unit sekolah banyak terdapat di pusat kota.

Jumlah sekolah negeri dan swasta pada setiap jenjang pendidikan belumlah merata di setiap kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Dalam mewujudkan akses pendidikan yang merata, hal yang sangat penting menjadi syarat terwujudnya tujuan tersebut adalah dengan penyebaran unit sekolah pada setiap jenjang pendidikan merata di setiap kecamatan sesuai dengan jumlah penduduk usia sekolah yang ada di kecamatan tersebut.

Masih banyaknya tenaga pengajar yang berstatus Non ASN atau masih berstatus Honorer berpengaruh pada mutu pendidikan. Jumlah tenaga pendidik yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sebanyak 8.878 orang. Dilihat dari status kepegawaiannya sebanyak 58,8% dari jumlah tersebut merupakan tenaga pendidik (guru) non ASN.

Dengan segala persoalan yang terjadi pada bidang pendidikan di Kota Pekanbaru maka Dinas Pendidikan melakukan berbagai macam upaya agar terwujudnya akses pendidikan yang merata dan bermutu di Kota Pekanbaru. Hal tersebut di dukung dengan meningkatkan peran pemerintah dalam hal ini adalah dinas pendidikan. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan menggunakan teori peran pemerintah yakni (1) Peran sebagai pelayanan masyarakat, (2) Peran sebagai fasilitator, (3) Peran sebagai pendamping, (4) Peran sebagai mitra, (5) Peran sebagai penyandang dana.

1. Peran Dinas Pendidikan Sebagai Pelayanan Masyarakat

Salah satu ukuran keberhasilan

dalam menyajikan pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada tingkat kepuasan pelanggan atau masyarakat yang dilayani. Instalasi pelayanan harus mempunyai standar pelayanan yang dipergunakan sebagai tolak ukur/pedoman dalam hal penyelenggaraan pelayanan. Pembuatan suatu standar pelayanan, tidak hanya mencantumkan standar-standar pelayanan tetapi juga harus ada kompensasi terhadap pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Kualitas pelayanan pada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dapat diukur dengan 5 hal yakni kehandalan, ketanggapan, kepastian, perhatian, dan wujud fisik. Ke 5 hal itu dapat dikatakan telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru karena Indeks Kepuasan Masyarakat untuk Dinas Pendidikan terbilang tinggi pada tahun 2018 yakni 81,26. Hal ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan dapat dikatakan telah maksimal dan memenuhi standar yang berlaku.

Sarana dan prasarana belahar yang sifatnya memberikan dukungan untuk mewujudkan kualitas output sangat penting, seperti keberadaan perpustakaan. Selain ini yang lebih penting adalah ketersediaan unit sekolah yang mampu menampung seluruh siswa usia sekolah.

Renstra Dinas Pekanbaru 2017-2022 telah membuat skenario pengembangan kota dan konsep struktur ruang kota. Adapun pada poin 5 skenario tersebut menyatakan bahwa “Mengembangkan kawasan pendidikan di kecamatan Tampan, Tenayan Raya, Bukit Raya, Marpoyan Damai dan Kecamatan Payung Sekaki yang didukung oleh akses ke sistem jaringan transportasi massal. Pada saat ini perkembangan pemukiman penduduk dan anak usia sekolah lebih terkonsentrasi pada kecamatan Tenayan, Tampan, Bukit Raya, Marpoyan Damai dan kecamatan Payung Sekaki. Untuk mengantisipasi lonjakan anak usia sekolah tersbut, maka kebijakan pemerintah Pekabaru melalui Dinas Pendidikan, dalam

hal penambahan unit Sekolah Baru (USB) lebih diutamakan ke kecamatan Tampan, Tenayan, Bukit Raya, Marpoyan Damai dan kecamatan Payung Sekaki”.

2. Peran Dinas Pendidikan Sebagai Fasilitator

Pemerintah berperan sebagai fasilitator yaitu pemerintah sebagai penyedia tempat atau penyedia fasilitas untuk pendidikan, kemudian pemerintah juga mengandalkan guru sebagai fasilitator bagi peserta didik. Mempunyai peran seperti ini pemerintah seharusnya bisa berbaur dalam masyarakat mendengarkan aspirasi masyarakat mengenai fasilitas sekolah yang ada di daerah tersebut dan benar-benar mengecek kebenaran pengaduan masyarakat akan kurangnya atau perlunya perbaikan fasilitas.

Guru memiliki peran penting bagi peserta didik, salah satunya sebagai fasilitator. Disini, guru bertindak sebagai orang yang memfasilitasi peserta didik untuk menjadi anak didik yang baik bagi kemajuan bangsa dan negara. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dalam proses pembelajaran siswa sebagai titik sentral, siswa yang lebih aktif, mencari dan memecah permasalahan belajar, dan guru membantu kesulitan siswa yang mendapat kendala, kesulitan dalam memahami, dan memecah permasalahan.

3. Peran Dinas Pendidikan Sebagai Pendamping

Pemerintah selain mempunyai tugas utama menjadi pelayan masyarakat, tapi pemerintah mempunyai tugas sebagai pendamping di dalam pendidikan. Bisa mendampingi masyarakat, menerima keluhan masyarakat mengenai pendidikan sehingga masyarakat bisa merasa teras ada pihak pemerintah yang akan selalu ada untuk mendampingi buat mereka untuk memperoleh jawaban atas keluhan yang mereka rasakan mengenai pendidikan yang ada di daerahnya masing – masing. Dan masyarakat akhirnya merasakan peran

pemerintah begitu nyata karena selalu ada di sekitar masyarakat itu sendiri.

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru mempunyai peran sebagai pendamping bagi para siswa dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Pekanbaru. Meningkatnya kualitas pendidikan di Kota Pekanbaru dapat dicapai salah satunya tingginya pencapaian hasil nilai USBN pada jenjang SD dan Ujian Nasional untuk jenjang SMP.

4. Peran Dinas Pendidikan Sebagai Mitra

Pemerintah berperan sebagai mitra disini yaitu pemerintah menjadi rekan kerjasama antara pihak sekolah dan masyarakat. Pemerintah dalam menentukan kebijakan dalam pendidikan harus bisa mengerti dan memahami keadaan pendidikan setiap daerah. Sehingga nantinya tidak ada unsur pemaksaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Untuk itu, setiap keputusan bisa dibicarakan dengan pihak sekolah dan masyarakat mengenai kebijakan yang akan dibuat mengenai pendidikan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menentukan tentang kebijakan baru.

Peran dinas pendidikan telah dapat menjadi mitra yang cukup baik dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek program pemerintah, demikian peran dinas selalu mendorong pihak sekolah untuk terus berkoordinasi dalam menanggulangi masalah yang terjadi selama jalannya proses belajar mengajar di sekolah dengan menjunjung asas keterbukaan atau transparansi, sehingga peran dinas dapat segera mengevaluasi hal-hal yang mudah menjadi polemik di masyarakat segera diatasi.

5. Peran Dinas Pendidikan Sebagai Penyandang Dana

Peran dinas pendidikan sebagai penyandang dana pendidikan memiliki keterbatasan kemampuan dalam menunjang kebutuhan sekolah, sehingga dinas memberikan solusi untuk pihak

sekolah bersama lembaga komite sekolah melibatkan wali murid dapat bersepakat mengumpulkan dana untuk keperluan mendesak karena biaya kebutuhan tersebut tidak mampu ditanggung sepenuhnya oleh dana bos seperti perawatan gedung sekolah yang mulai rentan roboh.

Kemampuan pihak sekolah sebagai penyandang dana bisa memanfaatkan sewajarnya pemberlakuan pungutan setiap tahun ajaran baru sekolah kepada wali murid karena pungutan sebetulnya tidak selalu buruk, tetapi juga berdampak positif untuk sarana partisipasi wali murid untuk membantu pihak sekolah.

Faktor Penghambat Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Dalam Mewujudkan Akses Pendidikan Merata Dan Bermutu Tahun 2018

1. Faktor Internal

a. Keterbatasan Anggaran

Dana merupakan point penting untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di dinas. Pihak dinas mengaku anggaran dana untuk kegiatan-kegiatan dikurangi. Walaupun demikian pihak dinas tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan meskipun dengan biaya yang minim. Dengan biaya yang minim dinas pendidikan tetap melaksanakan program peningkatan kompetensi guru, perbaikan sekolah, dan pembangunan unit sekolah baru

b. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Manusia sangat mempunyai peran yang vital dalam sebuah instansi pemerintahan. Pentingnya Sumber Daya yang berkualitas yaitu sebagai pemaksimalan dalam penerapan program kegiatan. Sumber Daya Manusia memiliki peran vital dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Di dinas pendidikan sendiri memang telah memiliki pegawai untuk melaksanakan sesuai bidangnya. Namun jumlah guru yang tersedia dan penyebarannya masihlah belum merata.

c. Tingkat Ekonomi Masyarakat

Harus diakui, karena tingkat ekonomi masyarakat yang rendah, maka peluang untuk memperoleh akses pendidikan akan mengecil. Tentunya hal ini berbeda dengan mereka yang memiliki kemampuan bayar tinggi, dapat memilih model dan jenis pendidikan yang disukai. Bukan hanya sekolah reguler saja, tetapi sekolah dengan taraf internasionalpun dapat diperoleh dengan mudah.

2. Faktor Eksternal

Analisis lingkungan eksternal adalah faktor-faktor di luar lembaga kedinasan yang ikut mempengaruhi dan mewarnai terhadap kebijakan pembangunan pendidikan di Kota Pekanbaru. Dalam hal ini faktor-faktor luar termaksud adalah perbedaan tingkat ekonomi masyarakat dan kesadaran masyarakat.

a. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran pengguna jasa/masyarakat adalah masih ada yang belum terlalu paham tentang pentingnya persyaratan administrasi perizinan, rekomendasi, pengajuan NISN atau NPSN dll. Disebabkan aktifitas keseharian mereka tetapi ada juga sebagian pengguna jasa/masyarakat yang sudah memahami akan hal tersebut, sehingga tidak menjadi faktor penghambat dalam kepengurusan jasa.

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka beberapa kesimpulan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai macam upaya untuk mewujudkan akses pendidikan yang merata dan bermutu di Kota Pekanbaru. Hal tersebut di dukung dengan meningkatkan peran pemerintah dalam hal ini adalah dinas

pendidikan. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan menggunakan teori peran pemerintah yakni (1) Peran sebagai pelayanan masyarakat, (2) Peran sebagai fasilitator, (3) Peran sebagai pendamping, (4) Peran sebagai mitra, (5) Peran sebagai penyandang dana.

2. Setiap kegiatan Pemerintah dalam melaksanakan urusan-urusan Pemerintah tidak selalu berjalan dengan optimal. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan akses pendidikan yang merata dan bermutu maka Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru mengalami beberapa hambatan yakni faktor internal yang meliputi keterbatasan anggaran dan sumber daya aparatur. Kemudian faktor eksternal meliputi tingkat ekonomi masyarakat dan kesadaran masyarakat.

2. Saran

1. Kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru diharapkan lebih efektif lagi dalam menjalankan perannya sebagai suatu institusi yang bertanggungjawab dalam mewujudkan akses pendidikan yang merata dan bermutu. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru juga dapat melaksanakan kerja sama dengan dinas lain dengan melakukan koordinasi yang terukur dan tujuan yang sama, ataupun dengan pihak swasta terutama dalam pembangunan unit sekolah baru.
2. Dalam menyikapi hambatan yang ada perlu kiranya untuk melakukan perencanaan yang lebih matang lagi agar dalam implementasi kebijakan tidak menemukan hambatan seperti yang telah terjadi sebelumnya. Diperbanyak program peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan staff yang ada di

lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Kemudian perlu digencarkan penyebaran informasi publik kepada khalayak banyak, lalu pemberian bantuan dana kepada masyarakat yang miskin dalam pembelian alat kelengkapan sekolah seperti seragam, buku tulis, tas dan sepatu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anis, Fuad dan Kandung, Sapto Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan publik*. Jakarta : Salemba Humanika

Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka

Burhan, Bungin. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada media Grup

Ellitan, Lena dan Lina Anatan. 2008. *Manajemen Strategi Oprasi Teori dan Riset di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

John W ,Creswell. 2016. *Research Design Pendekatan metode Kualitatif, Kuantitatif dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Kuncoro, Mudrajad. 2005. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga.

Lopes, Rizali. 2013. *Efektivitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kendale Kabupaten Sangihe*

Muhadam, Labolo 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.

Purwanto, Erwan Agus, 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media

Rahman, Fathur. 2018. *Teori Pemerintahan*. Malang: UB Press.

Suhardono, Edy. 1994. *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Wibawa, Samudra. 1984. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta : Intermedia.

Wirawan Sarwono, Sarlito. 2015. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.

Website

<https://www.linguitikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif>.

<https://Pemerintah.net/fungsi-pemerintah/> di akses tanggal 4 desember 2019 jam 20.30 wib

Jurnal dan Skripsi

Penelitian dari Mahasiswa Ilmu Universitas Riau Fani Fitriani tentang Peran Dinas Pendidikan Dalam Perumusan Pelaksanaan pencegahan anak Rawan putus sekolah di kota pekanbaru Tahun 2013 – 2015.

Penelitian dari Mahasiswa Ilmu pemerintahan Universitas Riau Ricardo Saputra tentang Peran

Dinas pendidikan kota pekanbaru dalam menanggulangi anak putus sekolah pada tingkat pendidikan sekolah dasar Tahun 2012 -2015.

Penelitian dari Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Riau Sukma Alfalah tentang kebijakan dinas pendidikan kota pekanbaru dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar Tahun 2015.

Peraturan dan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13
Tahun 2015 tentang Standar
Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 32 Tahun
2018 Tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendidikan

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 92
Tahun 2016 Tentang kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta tata kerja Dinas
Pendidikan kota pekanbaru.

Dokumen

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Dinas
Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun
2017 – 2018.

Rencana Strategis 2017-2022 (RenStra)
Dinas pendidikan kota pekanbaru.

Rencana Kerja 2018 (RENJA) Dinas
pendidikan kota pekanbaru.